

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu tantangan besar dalam masalah gizi yang dihadapi secara global, termasuk Indonesia, di mana hal ini mencerminkan adanya ketidakcukupan nutrisi kronis pada anak-anak. Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 151 negara dengan angka stunting yang masih tinggi.¹ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), suatu negara dapat dikatakan mengalami masalah kesehatan masyarakat apabila prevalensi balita dengan kondisi tubuh pendek (stunting) mencapai 20% atau lebih.² Kondisi stunting timbul akibat adanya kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, yang dimulai dari masa awal kehamilan hingga anak mencapai usia dua tahun.³ Sehingga, stunting saat ini menjadi salah satu permasalahan gizi yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menurunkan produktivitas generasi muda di masa mendatang.

¹ Fina Aura Regita and Ananta Prathama, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi," *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 12, no. 1 (2023): 27–40.

² Lppm.itk.ac.id, "Studi Prevalensi Stunting Di Indonesia: Perspektif Gizi Dan Kesehatan Balita," 2024. Diakses pada 03 Maret 2025 pukul 21.05

³ Mail.tebingtinggikota.go.id, "Stunting Itu Penting Dan Genteng," 2024, <https://mail.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/stunting-itu-penting-dan-genting>. Diakses pada 03 Maret 2025 pukul 22:00

Stunting bukan hanya masalah kurangnya pertumbuhan tinggi badan, namun kondisi yang lebih kompleks yang berakar dari kekurangan nutrisi jangka panjang, bahkan sejak masa sebelum kelahiran. Malnutrisi dalam jangka panjang, juga dikenal sebagai kurangnya asupan gizi, adalah penyebab utama stunting. Masalah gizi tersebut dapat berawal dari dalam kandungan, sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi ibu selama periode kehamilan.. Selain itu jika kebutuhan nutrisi tidak dipenuhi selama masa tumbuh kembang, anak juga dapat mengalami stunting.⁴

Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8%, masih di atas target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024.⁵ Stunting perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya dapat berlanjut hingga anak dewasa, terutama dalam aspek pertumbuhan fisik dan kognitif jika tidak segera ditangani. Stunting dapat mengganggu perkembangan kognitif, mengakibatkan penurunan kemampuan belajar. Meski demikian, dalam jangka panjang kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas hidup, terutama karena terbatasnya peluang pendidikan yang dapat diakses, peluang kerja, dan peningkatan penghasilan. Selain itu, anak-anak yang stunting lebih rentan

⁴Biofarma.co.id, “7 Penyebab Stunting Pada Anak,” 2024, n.d., <https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/7-penyebab-stunting-pada-anak>. Diakses pada 29 April 2025 pukul 13.40

⁵ Kemenkes BKPK, “Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024,” Kemenkes BKPK, 2025, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/>. Diakses pada 19 september 00.37

mengalami obesitas di kemudian hari, yang dapat menyebabkan diabetes, hipertensi, dan kanker.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan penurunan stunting sebagai tujuan utama pemerintah Indonesia. Ayat 4 Pasal 1 menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif untuk ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Stunting menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, yang ditandai dengan ditetapkan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia melalui pembentukan tim percepatan yang terdiri atas direksi dan manajemen senior.⁶ Peraturan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan dan sinergi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Melalui kerja sama multisektor di tingkat pusat, daerah, dan desa, upaya ini dilakukan melalui pendekatan yang terpadu, menyeluruh, terkoordinasi, dan berkualitas. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024.⁷

Pada dasarnya, pemerintah bukanlah satu-satunya aktor yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting, juga

⁶ Kusroh Lailiyah, "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 16–33.

⁷ Lailiyah. Hlm 20

memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor lain yang sebagai pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat untuk menurunkan angka stunting. *Collaborative governance* diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serta memastikan keberlanjutan program penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

Collaborative secara etimologi berarti menggabungkan kekuatan atau meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Konsep kolaborasi pada dasarnya menggambarkan cara kerja yang tidak mengenal batas, baik antara sektor, organisasi, maupun negara, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut Saleh, kolaborasi merupakan bentuk hubungan antarpihak baik individu maupun organisasi yang dibangun atas dasar kesepakatan untuk bertindak bersama melalui berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan tanggung jawab demi mencapai tujuan atau memecahkan masalah secara kolektif.⁸

Collaborative governance adalah suatu capaian untuk mencari cara yang terbaik dari sebuah kebijakan. *Collaborative governance* merupakan paradigma yang mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan nonpemerintah, seperti LSM, pelaku usaha, tokoh masyarakat, maupun kalangan intelektual, dalam merumuskan kebijakan secara kolektif. Emerson dan Nabatchi dalam Noor menegaskan bahwa *collaborative governance* adalah

⁸ Choirul Saleh, "Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi," *Pustaka Universitas Terbuka* 1 (2020). Hlm 5

sebuah pendekatan dalam perumusan kebijakan publik dan manajemen publik yang bermakna, karena di dalam prosesnya terdapat partisipasi berbagai aktor di luar pemerintah mulai dari tokoh masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, hingga lembaga nonpemerintah untuk bersama-sama menyelenggarakan kepentingan publik.⁹

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah analisis kebijakan publik dari sudut pandang keilmuan yang mendorong kolaborasi antarpihak atau aktor.¹⁰ Dalam hal ini, Ansell dan Gash juga membuat peta atau indikator untuk menentukan proses kolaborasi, seperti berbicara satu sama lain, membangun kepercayaan aktor, menekankan pada komitmen bersama, dan membangun pemahaman bersama. *Collaborative governance* pada dasarnya sebagai suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik yang menekankan pada pentingnya kerja sama antara pemerintah dan berbagai aktor nonpemerintah.

Upaya penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, di balik berbagai program yang telah diupayakan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 masih cukup tinggi, yaitu 29,9%, dan baru menurun menjadi 26,6% pada tahun 2024, angka yang masih jauh di atas target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan

⁹ Mohammad Noor, Falih Suaedi, and Antun Mardiyanta, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik* (Bildung, 2022). Hlm 54

¹⁰ Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–71.

stunting perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor serta kendala yang dihadapi di lapangan. Sehingga diperlukan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan berbagai sektor terkait. Penelitian ini melibatkan aktor internal berupa pemerintah daerah dan OPD terkait yang tergabung dalam TPPS, serta aktor eksternal yang meliputi lembaga nonpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Bara

Penelitian mengenai stunting serta peran pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya Fina Aura Regita, Ananta Prathama,¹¹ Allya Tsamarah Yunifar, Bambang Kusbandrijo dan Anggaeny Puspaningtyas,¹² Muhammad Husni Mubaroq, Abdul Wachid,¹³ Sri Meiyenti,¹⁴ dan Rati Sumanti.¹⁵ Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih fokus pada aspek umum atau bersifat nasional. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis *collaborative governance*, khususnya di tingkat kabupaten, dalam penurunan angka stunting.

¹¹ Regita and Prathama, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi."

¹² Allya Tsamarah Yunifar, Bambang Kusbandrijo, and Anggaeny Puspaningtyas, "Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469) 2, no. 04 (2022): 148–58.

¹³ Muhammad Husni Mubaroq and Abdul Wachid, "Upaya Pemerintah Daerah Kudus Dalam Pencegahan Stunting," *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama* 12, no. 1 (2024): 66–76.

¹⁴ Sri Meiyenti, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Sumatera Barat: Perspektif Budaya" (Universitas Andalas, 2026).

¹⁵ Rati Sumanti, "Collaborative Governance: Strategi Pencegahan Dan Penurunan Prevalensi Stunting," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 19, no. 1 (2024): 13–26.

Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada model kolaborasi yang digunakan tanpa mengulas secara mendalam keterlibatan antaraktor dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung melihat dari sudut pandang pemerintah, sementara perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat program stunting masih kurang diangkat, sehingga dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran belum tergambarkan secara utuh. Penelitian terdahulu belum menggali secara mendalam proses implementasi kebijakan dan kolaborasi di lapangan, khususnya terkait koordinasi, komunikasi antaraktor, pembagian peran, serta dinamika yang muncul selama pelaksanaan program.

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pasaman Barat, yang hingga saat ini belum banyak dikaji dari strategi *collaborative governance*. Penelitian ini juga difokuskan pada proses bagaimana kolaborasi itu dilaksanakan, peran dan interaksi antaraktor, serta dinamika yang terjadi dalam kolaborasi tersebut, hingga dampaknya terhadap kelompok sasaran, yang dilakukan dalam menurunkan angka stunting pada tahun 2022-2024. Sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan *state of the art* untuk memperkuat landasan teori dan analisis penelitian ini. Selain itu, peneliti mengacu pada teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang menguraikan terdapat lima proses utama dalam kolaborasi, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Penelitian ini, kelima proses tersebut digunakan

untuk menganalisis *collaborative governance* dalam menurunkan stunting di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14% pada 2024. Data terbaru dari survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, yang diumumkan pada tahun 2025, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia sebesar 19,8 persen, turun tipis sekitar 1,7 persen dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 21,5 persen.¹⁶ Walaupun prevalensi stunting menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka stunting di Indonesia masih tinggi, yang memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting untuk mencapai perbaikan di bidang kesehatan masyarakat.

Data prevalensi stunting menunjukkan bahwa angka stunting masih tinggi di beberapa wilayah Sumatera Barat. Salah satunya adalah Pasaman Barat, di mana stunting berada pada 29,7% pada tahun 2023 dan 26,6% pada tahun 2024.¹⁷ Namun, angka stunting di Sumatera Barat menunjukkan pola naik turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, stunting tercatat sebesar 23,3% dan meningkat menjadi 25,2% pada tahun 2022. Selanjutnya, angka tersebut menurun menjadi 23,6% pada tahun 2023, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 hingga mencapai 24,9%.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Sumatera Barat masih belum

¹⁶ BPKP, "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024." Diakses pada 21 Maret 2025 pukul 20.02

¹⁷ BPKP. Diakses pada 21 September 2025 pukul 21:41

¹⁸ Neng Kamarni, "Kausalitas Antara Variabel Makro Dan Stunting Di Sumatera Barat Periode 2021 - 2023," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 2024, 658–68.

mengalami penurunan yang stabil. Berikut data persebaran jumlah angka stunting di Sumatera Barat tahun 2022-2024.

Tabel 1.1
Perbandingan Presentase Angka Stunting di Sumatera Barat Tahun 2022-2024

No	Kab/Kota	Angka Stunting 2022	Angka Stunting 2023	Angka Stunting 2024
	Nasional	21,6	21,5	19,8
1	kepulauan Mentawai	32	33,7	26,2
2	Pasaman Barat	35,5	29,7	26,6
3	Pasaman	28,9	28,6	29,1
4	Lima Puluh Kota	24,3	28,6	26,6
5	Sijunjung	30,2	28,5	28,2
6	Pesisir Selatan	29,8	27,0	26,5
7	Solok	24,2	25,4	29,5
8	Kota Padang	19,5	24,2	20,6
9	Agam	24,6	20,1	27,0
10	Kota Bukittinggi	16,8	20,1	16,8
11	Kota Payakumbuh	17,8	19,8	16,4
12	Kota Sawah lunto	13,7	19,5	20,0
13	Padang Pariaman	25,0	19,4	26,6
14	Tanah Datar	18,9	18,5	26,9
15	Dharmas Raya	24,6	17,7	20,5
16	Kota Pariaman	18,4	17,7	15,7
17	Kota Solok	18,1	16,3	18,6
18	Kota Padang Panjang	16,8	15,8	19,0
19	Solok Selatan	31,7	14,7	21,5
	Sumatra Barat	25,2	23,6	24,9

Sumber: Data Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022-2024 dan Survei Kesehatan Indonesia 2023

Kondisi stunting di Sumatera Barat dari tahun 2022-2024 menunjukkan variasi yang signifikan antara kabupaten dan kota. Berdasarkan tabel tersebut, meskipun prevalensi stunting masih cukup tinggi di beberapa kabupaten, kerja keras pemerintah yang lebih kuat pada tahun 2024 mengurangi angka stunting di beberapa daerah. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bahwa penurunan stunting di pasaman barat cukup signifikan terlihat pada tahun 2023 sebesar 29,7% dan 2024 sebesar 26,6%, hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih pasaman barat sebagai lokasi penelitian.

Laju penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat pada periode 2007-2023 tercatat lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional maupun Provinsi Sumatera Barat.¹⁹ Pasbar mencatat rata-rata penurunan sebesar 3,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan nasional 3,3% dan Sumbar 2,6%. Namun, prevalensi stunting di Pasbar pada tahun 2024 masih cukup tinggi, yaitu 26,6%, lebih besar dibandingkan capaian provinsi 24,9% maupun nasional 19,8%.

Tabel 1.2
Persentase Angka Stunting di Pasaman barat pada tahun 2022-2023

No	Tahun	Angka Stunting
1	2022	35,5
2	2023	29,7
3	2024	26,6

Sumber: Data Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia 2023

Meskipun berhasil menekan angka stunting sebesar 5,8% dari tahun 2022 ke 2023 dan sebesar 3,1 % pada tahun 2024, namun pemerintah daerah Pasaman Barat masih harus bekerja keras untuk mencapai target 14%. Namun, perlu diperhatikan bahwa penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat tidak lepas dari penerapan *collaborative governance*, di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperkuat program percepatan penanganan stunting.

Turunnya angka stunting di Pasaman Barat pada tahun 2023 tentunya menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Mengingat daerah

¹⁹ Pasamanbaratkab.go.id, “Laju Penurunan Stunting Di Pasbar Lebih Baik, Pemda Bersama Tanoto Foundation Inisiasi Program Stunting 2.0,” 2025. Diakses pada 22 September pukul 03.11

dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah Kabupaten Pasaman Barat, dengan prevalensi stunting mencapai 35,5%. Angka ini merupakan yang tertinggi di provinsi tersebut dan mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,5 poin dari tahun 2021 yang sebesar 24%. Maka, itu untuk terus mencapai target nasional serta tidak mengulangi kesalahan yang sama kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam penurunan stunting.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan kebijakan strategis berupa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Nagari. Melalui peraturan ini, pemerintah kabupaten menetapkan target tahunan penurunan prevalensi stunting di tingkat nagari dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Selain itu, program konvergensi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kader posyandu, dinas kesehatan, dan mitra swasta. Untuk mencegah konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, penanganan stunting disarankan untuk memberikan prioritas utama kepada ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun selama 1.000 hari pertama kehidupan mereka. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antaraktor. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan *collaborative governance* untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan data e-PPGBM Februari 2024, tercatat 5.098 balita mengalami stunting di Pasaman Barat, dengan angka prevalensi mencapai

29,7% menurut publikasi SSGI 2024.²⁰ Komunikasi perubahan perilaku yang melibatkan tokoh kunci masyarakat seperti tokoh agama dan budaya dianggap sangat penting karena mereka berperan sebagai sumber informasi, penggerak utama, teladan, pendidik dalam forum-forum, serta bagian dari masyarakat yang menjadikan agama sebagai landasan hidup. Beberapa masalah yang muncul dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) termasuk rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, kurangnya ASI eksklusif, kurangnya sanitasi dan akses air bersih, dan banyaknya balita stunting yang tinggal di rumah yang dihuni oleh keluarga perokok.



Gambar 1.1 Kolaborasi Lintas Sektor Penurunan Stunting di Pasaman Barat

Dalam rangka menindaklanjuti Aksi ke-6 Konvergensi Stunting, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kolaborasi lintas sektor dengan Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta melalui kegiatan lokakarya pelatihan sistem manajemen data pengetahuan sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Pasaman

²⁰ Ahmad Ikhsan, "Percepatan Penurunan Stunting, Pemkab Pasbar Gandeng Tokoh Lintas Agama Dan Budaya," *ri.co.id*, 2024, <https://rri.co.id/palembang/metropolitan/996999/percepatan-penurunan-stunting-pemkab-pasbar-gandeng-tokoh-lintas-agama-dan-budaya#>.

Barat selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat, Kemenag, para OPD, serta stakeholder terkait lainnya.²¹ Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, sehingga kolaborasi dan penguatan manajemen data diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.



Gambar 1.2 Pemaparan Kinerja TPPS dalam Upaya Penurunan Stunting di Pasaman Barat

Melalui Aksi Konvergensi Stunting, Pemerintah Pasaman Barat melakukan upaya kolaborasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan. Menurut publikasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat telah diturunkan sebesar 5,8% dari 35,5% pada tahun 2022 menjadi 29,7% pada tahun 2023. Ada banyak pihak yang bekerja sama untuk mencapai hal ini. Ini

²¹ Padangmedia.com, “Kolaborasi Dapat Sukseskan Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Pasbar,” padangmedia.com, 2023, <https://padangmedia.com/berita/kolaborasi-dapat-sukseskan-percepatan-penurunan-angka-stunting-di-pasbar/>. Diakses pada 20 Desember 2025 pukul 22:59

termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan agama, serta individu swasta. Pada tahun 2023, Pemkab Pasaman Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp72,43 miliar atau 19,02 persen dari belanja langsung dengan tingkat realisasi mencapai 85,12 persen sebagai bentuk komitmen dalam percepatan penurunan stunting.²² Selain itu, kolaborasi juga diperkuat melalui peran TPPS yang melaksanakan sepuluh program pokok PKK, terutama dalam pemantauan balita dan ibu hamil melalui posyandu, perbaikan pola asuh, peningkatan ekonomi rumah tangga, pemenuhan gizi keluarga, serta pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan.



Gambar 1.3 Penyaluran CSR untuk Stunting

Untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, Pemkab Pasaman Barat menggandeng perusahaan sawit melalui penyaluran dana CSR sebesar Rp304.950.000. Hal ini menjadi bagian dari inovasi “Brondol Sawit” (Berkolaborasi Kendalikan dan Nalkan Stunting melalui Intervensi Sensitif Terpadu) yang menargetkan penurunan angka kemiskinan

²² Antara, “Pemkab Pasaman Barat Turunkan Angka Stunting 5,8 Persen,” *Antaranews.com*, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/4144155/pemkab-pasaman-barat-turunkan-angka-stunting-58-persen>. Diakses pada 21 Desember 2025 pukul 19:41

dari 7% menjadi 5,75% dan penurunan prevalensi stunting dari 26,6% menjadi 13,5% pada 2025.²³ Diharapkan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan upaya pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan daerah yang terkena dampak stunting di Pasaman Barat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat terjadi karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan berbagai stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut dapat dilihat dari adanya dialog tatap muka melalui berbagai forum koordinasi seperti rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), lokakarya pelatihan sistem manajemen data bersama Tanoto Foundation. Kolaborasi juga diperkuat oleh kepercayaan yang terbangun melalui transparansi dalam pengelolaan program dan keterbukaan dalam berbagi data serta informasi antastakeholder.

Selain itu, komitmen terhadap proses dapat dilihat dari adanya pelaksanaan program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai aktor dengan peran masing-masing. Pemahaman bersama ini juga mencakup kesepakatan tentang penyebab spesifik stunting di Pasaman Barat, yaitu rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, kurangnya ASI eksklusif, minimnya akses sanitasi dan air bersih, serta faktor lingkungan seperti banyaknya balita stunting yang tinggal di rumah bersama keluarga perokok. Hasil sementara yang positif berupa penurunan prevalensi stunting dari 35,5%

²³ Pasamanbaratkab.go.id, "Pemkab Pasbar Gandeng Perusahaan Sawit Atasi Kemiskinan Dan Stunting," Pasbar, pasamanbaratkab.go.id., 2025, <https://pasamanbaratkab.go.id/news/Pemkab-Pasbar-Gandeng-Perusahaan-Sawit-Atasi-Kemiskinan-dan-Stunting>, diakses pada 11 November 2025 pukul 21: 48

(2022) menjadi 29,7% (2023) dan 26,6% (2024), dengan laju penurunan 3,6% per tahun yang lebih baik dibandingkan capaian nasional (3,3%) maupun Provinsi Sumatera Barat (2,6%), telah memperkuat momentum kolaborasi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut dan menganalisis bagaimana kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah dan para aktor yang terlibat dalam menurunkan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini adalah:

Bagaimana *collaborative governance* dalam menurunkan stunting di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis *collaborative governance* dalam menurunkan stunting di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022-2024?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, terutamanya pada kajian *collaborative governance*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengkaji penerapan kolaborasi antar-aktor dalam upaya penurunan stunting di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra strategis, untuk memahami secara menyeluruh permasalahan serta solusi penurunan stunting di berbagai wilayah.

